



LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024



PEMERINTAH PESISIR SELATAN

Painan, 6 JANUARI 2025

Acc
f 14/2-2025

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana Laporan kinerja ini disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.



Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Di harapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan Kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA



YUSKARDI, SST, MT

NIP. 19700123 199903 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Visi dan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

Visi : "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional"

Misi : "Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis" misi ke-6 RPJMD

Berdasarkan visi dan missi Perangkat Daerah, telah ditetapkan tujuan, indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menunjang visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan 2 Sasaran Strategis dan 3 indikator kinerja Esselon II.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indicator kinerja tahun 2024.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja yang berpedoman pada Misi 2 RPMJD sebesar **85,25%**. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Capaian

Indikator Kinerja Persasaran,

N O	Sasaran Strategis (Sasaran Kepala OPD)	Indikator Kinerja ESS.II		Satuan	Target 2023	Realisa si	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Bekinerja	1	Nilai Akip Perangkat Daerah	Persenta se	A (87,5)	BB (75,72)	86,19%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Nagari	15	7	46,66%
		2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	Nagari	2	6	300%
		3	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	Nagari	5	3	60%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Persenta se	100%	89%	89%
Rata-Rata Capaian Kinerja							113,37



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUT.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud Tujuan.....	I-2
1.3 Struktur Organisasi.....	I-3
1.4 Dasar Hukum	I-6
1.5 Gambaran Umum OPD.....	I-7
1.6 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	I-8
1.7 Kepegawaian	I-9
1.8 Sistematika Penyusunan	I-10
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II-1
2.1 Rencana Strategis.....	II-1
2.1.1 Visi.....	II-1
2.1.2 Misi.....	II-1
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran.....	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja.....	II-2
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	II-3
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1. Metodologi Penilaian Kinerja	III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3. Capaian Kinerja.....	III-4
3.4. Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	III-7
3.5. Akuntabilitas Keuangan	III-13
BAB IV	
PENUTUP.....	IV-1
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan kinerja tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan Kinerja dan pemenuhan prinsip akuntabilitas. LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil -hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2024.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggung jawaban tahunan Organisasi Perangkat Daerah kepada Pemerintah dan stakeholder atas pencapaian kinerja serta visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.



1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang Penanggulangan Bencana dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diubah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penangulangan Bencana Daerah dengan Penambahan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran . Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

Fungsi Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;



- d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri Dari :

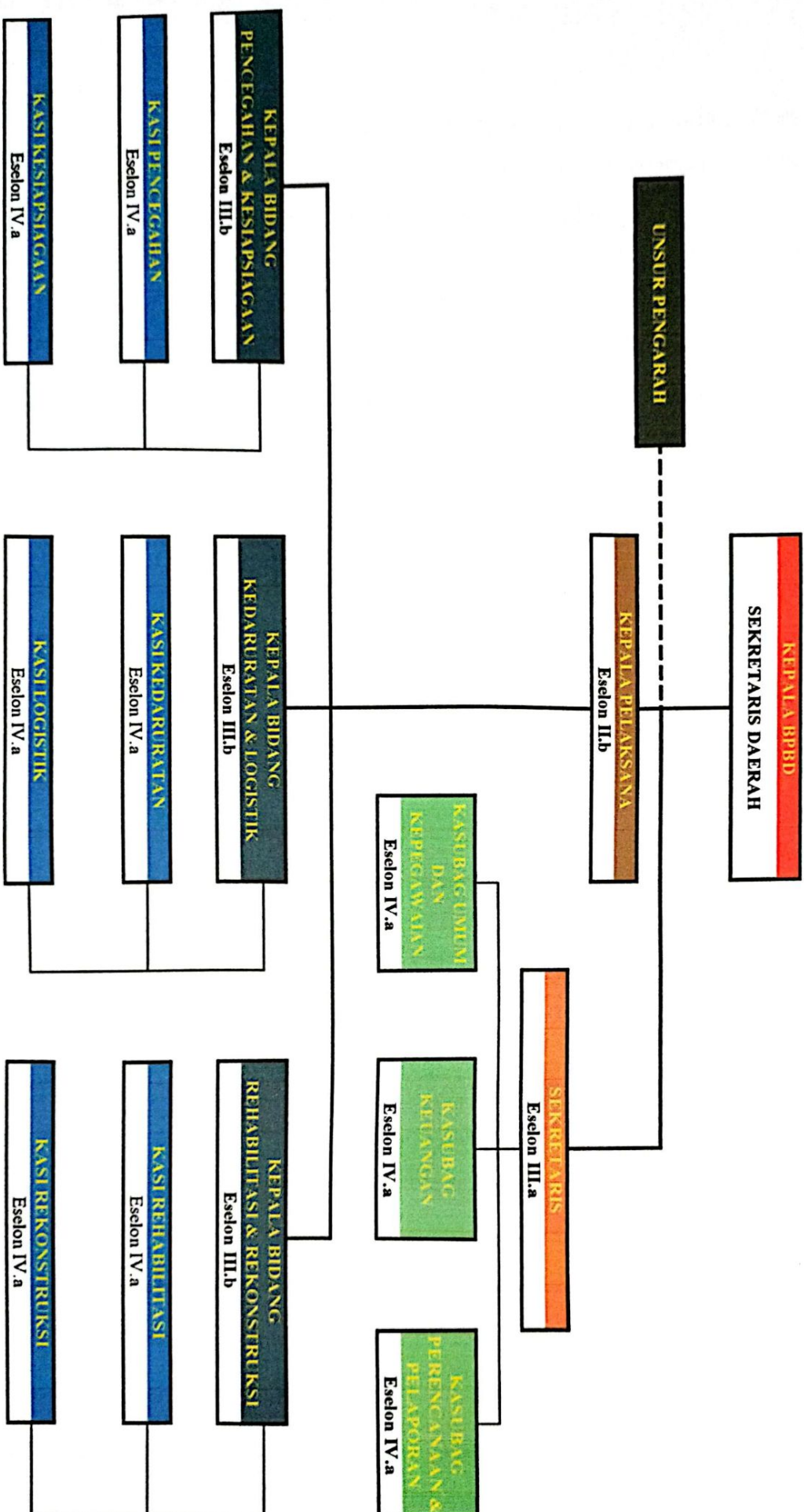
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi.
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD
KABUPATEN PESIR SELATAN**
Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 7 Tahun 2014





1.4. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



1.5. GAMBARAN UMUM OPD

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yang Selanjutnya Disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah di kabupaten pesisir selatan.
3. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang di jabat secara ex-officio oleh seorang sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Selatan.
4. Unsur Pengarah adalah instansi yang terkait sebagai tenaga profesional berdasarkan bidang urusannya di lingkup BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bencana adalah peristiwa atau Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menjalankan Fungsi:
 1. Koordinasi Penaggulangan Bencana
 2. Komando Penanggulangan Bencana
 3. Pelaksana Penanggulangan Bencana



1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

1. Merujuk pada identifikasi permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya.

1.7 KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 89 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Sukarela. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah yang Pegawai dimiliki oleh BPBDB Kabupaten Pesisir Selatan (per 31 Desember 2024)

GOLONGAN	ESSELON				Staf	Total
	II.b	III.a	III. b	IV.a		
Golongan : IV / d	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / c	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / b	1	0	0	0	1	2
Golongan : IV / a	0	0	2	0	0	2
Golongan : III/ d	0	1	1	0	2	4
Golongan : III/ c	0	0	0	5	2	7
Golongan : III/ b	0	0	0	0	3	3
Golongan : III/ a	0	0	0	0	2	2
Golongan : II / d	0	0	0	0	0	0
Golongan : II / c	0	0	0	0	2	2
Golongan : II / b	0	0	0	0	0	0
Golongan : II / a	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS	1	1	3	5	12	22
Tenaga Sukarela S1	0	0	0	0	17	17
Tenaga Sukarela DIII	0	0	0	0	1	1
Tenaga Sukarela SMA	0	0	0	0	49	49
Jumlah Tenaga Sukarela	0	0	0	0	67	67
Total	1	1	3	5	79	89

1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Organisasi, maksud dan tujuan, dasar hukum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja**
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.



4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tergambarkan dalam suatu bentuk, untuk mencapai masa depan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dan mengacu pada Visi Bupati Pesisir Selatan yaitu:

"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional"

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondisi masyarakat di masa depan yang menggambarkan tujuan dan sasaran Strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, Dunia usaha dan masyarakat pada umumnya

2.1.2. Misi

Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

"Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis"
misi ke-6 RPJMD.

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :



“Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis”

2.1.4. Sasaran

Sasaran yaitu “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri”.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 :

NO	SASARAN (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II		TARGET 2024
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (87,5)
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan secara Mandiri	1	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15
		2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2
		3	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	5
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1	Nilai Kematangan Inovasi PD	100%

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 berdasarkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perjanjian Kinerja tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak di capai Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2024.



Target Kinerja mempresentasikan Nilai Kuantitatif yang harus di capai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat Kegiatan Maupun Sasaran Tahunan. Target Kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 disusun setelah dilakukan desk dengan Bapedalitbang yang telah disesuaikan dengan Sasaran Strategis pada Renstra yaitu Meningkatnya Kapasitas dalam menghadapi Bencana dengan Indikator Kinerja, Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah daerah Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Pemerintah daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Level dalam RPJMD	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	Indikator jumlah nagari tangguh bencana adalah untuk melihat banyaknya nagari yang telah memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
Formulasi	Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana
Sumber data	BPBD
Penanggung Jawab	DPMDP2KB, BPBD

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (Akhir Renstra)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Berkurangnya Risiko Bencana	Indek Risiko Bencana	100	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
				Meningkatnya Masyarakat dalam pembangunan dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	182	182	51	15	12	17
					Jumlah Nagari Tangguh Madya	0	0	2	2	6	8
					Jumlah Nagari Tangguh Utama	0	0	5	5	5	8
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BPBD			40	89	91	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.2 RENCANA KINERJA

Kinerja Memerlukan ukuran sehingga yang dinilai dengan membandingkan terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kuantitatif. Indikator Kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (Specific), Terukur (Measurable) dapat dicapai secara rasional (Achivable), Relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (Relevant) dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (time-bound) yang disingkatkan dengan SMART diuraikan sebagai berikut :

1. Spesific/Spesifik (s) : Indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan maltitafsir).
2. Measurable / Terukur (m) : Dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (Kuantitas atau Kualitas)



3. **Echiveable (A)** : dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

4. **Result-Oriented / Relevant (R)** : Terkait secara logis dengan kebijakan / program / kegiatan yang diukur tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi

5. **Time-Bound (T)** : Memperhatikan rentang waktu pencapaian untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa- masa sebelumnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (**S**pecific, **M**easurable, **A**ttainable, **R**elevant dan **T**ime-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2. Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan membimbing penetapan target.

3. Tujuan Strategis:

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

4. Indikator Kinerja:

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5. Target Spesifik:

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6. Rencana Aksi:

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**7. Monitoring dan Evaluasi:**

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

**Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Berkurangnya Risiko Bencana	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	BB (75)
		Meningkatnya Masyarakat dalam pembangunan dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	Nagari	15
			Jumlah Nagari Tangguh Madya	Nagari	2
			Jumlah Nagari Tangguh Utama	Nagari	5
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BPBD	Tanpa Satuan	40

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Untuk Mencapai Target Kinerja Yang telah ditetapkan maka dukungan program / Kegiatan sangat Perlu diperhatikan seperti tabel dibawah ini.

**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



			Selatan	
2.	Meningkatnya Masyarakat dalam pembangunan dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama Jumlah Nagari Tangguh Madya Jumlah Nagari Tangguh Utama	Peruk BNPB No 1 Tahun 2012 tentang : pedoman umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BPBD	Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Program Penanggulangan Bencana

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ke -52 RPJMD	Jumlah Nagari Tangguh bencana	Nagari	Pratama	Pratama (182)	Pratama (51)	Pratama (15)	Pratama	Pratama (17)
			(182)				(12)	
			Madya (0)	Madya (0)	Madya (2)	Madya (2)	Madya (6)	Madya (8)
			Utama (0)	Utama (0)	Utama (5)	Utama (5)	Utama (5)	Utama (8)

Faktor Keberhasilan:

1. Pendekatan Langsung Ke Nagari-Nagari Untuk Pembinaan KSB
2. Menyediakan Dana Sosialisasi Tentang Nagari Tangguh dari APBD
3. Pendekatan Dengan OPD Terkait dan Penyaluran Program Inovasi Bencana
4. Menggandeng Swasta Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam



Indikator nagari tangguh bencana adalah kemampuan nagari untuk menghadapi ancaman bencana, beradaptasi, dan memulihkan diri. Indikator ini dapat berupa kebijakan, rencana, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Berikut adalah beberapa indikator nagari tangguh bencana:

- Kebijakan dan peraturan terkait bencana
- Rencana penanggulangan bencana
- Rencana aksi komunitas
- Forum penanganan bencana
- Tim relawan bencana
- Peta dan kajian risiko
- Peta jalur evakuasi dan tempat pengungsian
- Sistem peringatan dini
- Pelatihan untuk pemerintah, relawan, dan warga
- Pelibatan masyarakat



Nagari tangguh bencana dapat diukur melalui penilaian mandiri. Hasil penilaian mandiri ini dapat mengelompokkan nagari menjadi tangguh bencana pratama, madya, atau utama.

Indikator ini Ditunjang Oleh Program Penanggulangan Bencana Dengan Target Anggaran Rp.1.737.362.705,- dan Realisasi Sebesar Rp.1.682.691.597,- Atau Capaian 96,85% Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.180.907.689
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.737.367.705



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Bekinerja	1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (87,5)	BB (75,72)	86,19%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15	7	46,66%
		2 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2	6	300%
		3 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	5	3	60%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi OPD	100%	89%	89%



Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 5 (Lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Bekinerja
 - ❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target A (87,5). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah BB (75,72) atau sebesar 86,19% dengan predikat **baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nilai Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memakai nilai evaluasi tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh pada bulan maret tahun 2025.
- 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri
 - a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu
 - ✓ Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
 - ✓ Ganting Mudik Selatan
 - ✓ Langkitan
 - ✓ Nagari Durian Seribu
 - ✓ Duku Utara
 - ✓ Barung- Barung Belantai Tengah
 - ✓ Pulau KaramNagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari
 - b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu
 1. Nagari Duku
 2. Nagari Duku Utara
 3. Nagari Barung-Barung Belantai TengahTarget tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..
 - c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :
 1. Nagari Ampang Pulai
 2. Nagari Painan Selatan
 3. Nagari Amping Parak

3) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- ❖ Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target 100,00. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 89,00 atau sebesar 89,00% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian Rata- Rata ke 3 (Tiga) Indikator Kinerja tersebut diatas adalah 85,51%.

3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a) **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	A (87,5)	BB (75,72)*	86,19%
Rata-rata capaian (%)						86,19%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

b) **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi
----	---------	-------------------	-----------



			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A (86,21)	BB (75,72)	A (87,5)*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A (87,5)*	AA (90,43)	96,66	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar	Kementerian Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (87,5)*	BB (75,72)*	BB**

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

**) Data Capaian Tahun 2022

Sumber : 1. Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Prov. Sumbar

2. <http://1data.menpan.go.id>

e Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

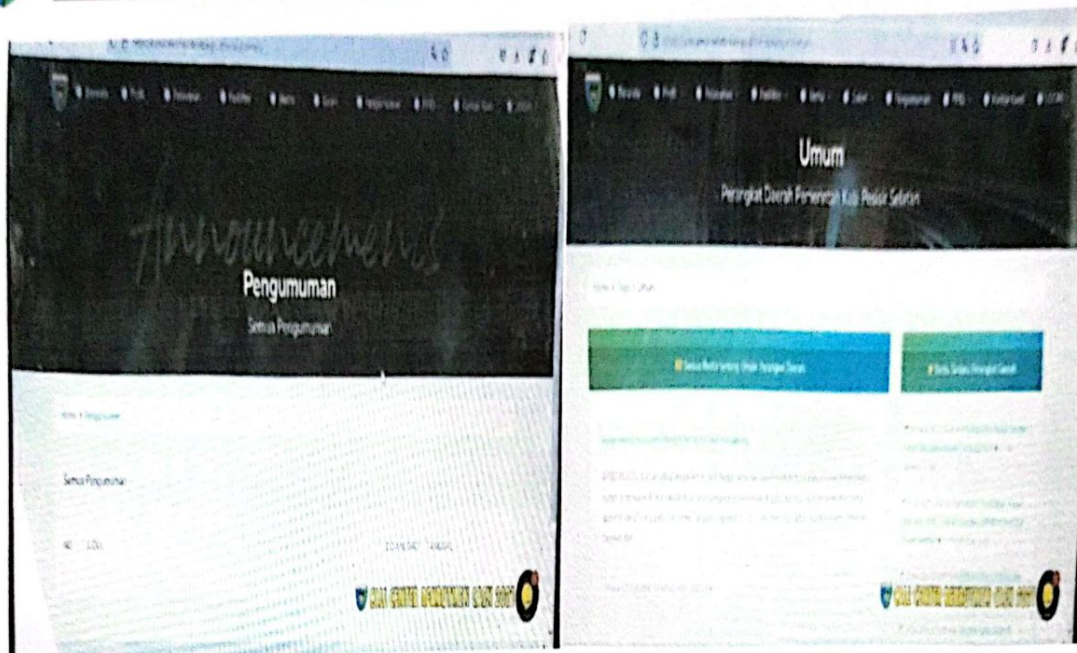
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan

Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id/#> dengan tampilan sebagai berikut :

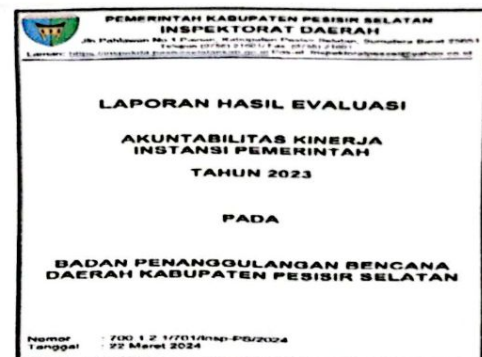
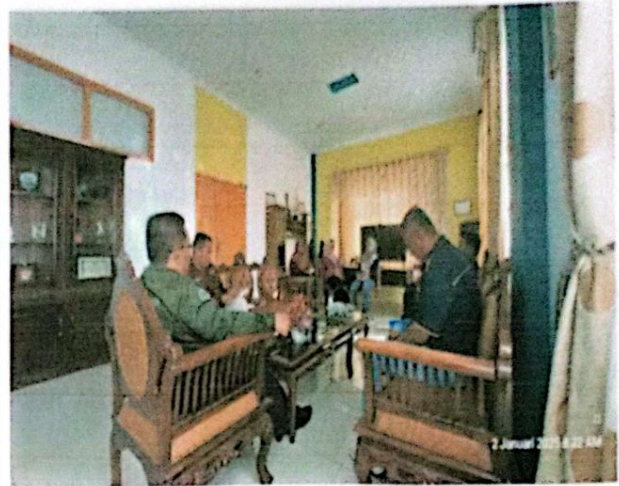


2. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan rewiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN DAERAH



JL. H. Agus Salim Paiman, Email bpbdpessel84@gmail.com

DAFTAR MASYARAKAT RAWAN BENCANA
MENDAPATKAN INFORMASI LAYANAN KESIAPSIAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH MASYARAK AT	DOKUMENTASI
----	----------------	--------------------------	-------------



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



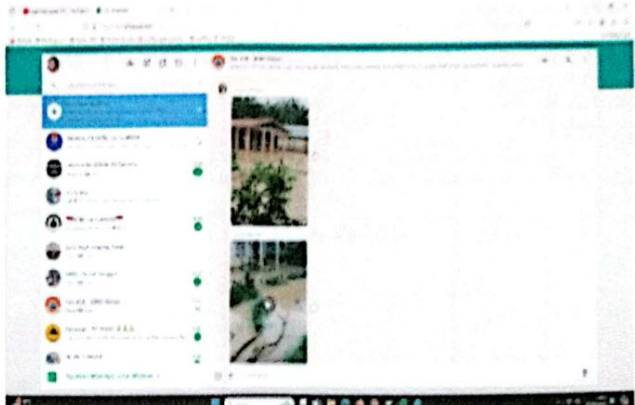
1	Sosialisasi Lewat Sosial Media Face Book	1.184	
2	Sosialisasi Lewat youtube Bpbd Pessel	2.111	
3	Sosialisasi Lewat radio langkisau	103.937	



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



4	Sosialisasi lewat baliho	52.600	
5	Sosialisasi lewat kelompok siaga bencana lewat WA Grup	82.451	
6	Sosialisasi lewat TVRI, Metro, Minang Kabau TV, dll	85.808	
7.	Sosialisasi Lewat Tiktok	9.231	
Hasil		337.322	
Target kelompok Umur 15-64 th		351.421	

f Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah badan penanggulangan bencana daerah	A (87,5)	BB (75,72)	86,19	4.180.907.689	3.846.437.010	92,00	

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 92,00%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah A (87,5), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebesar BB (75,72) serta untuk capaian kinerja sebesar 94,84%. Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

- a) Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di website badan penanggulangan bencana daerah.

- b) Agar membuat ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan yang memenuhi kriteria SMART dan Cukup pada Rencana Strategis (Renstra).
- c) Agar memaksimalkan upaya pencapaian kinerja tercapai lebih dari 90%
- d) Agar melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dengan membuat laporan/notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Agar Membuat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja.
- b) Agar melengkapi dokumen IKU dengan definisi operasional yang jelas dan cara mengukur indikator kinerja yang memadai, yaitu harus membuat informasi sebagai berikut :
 - Siapa
 - Sasaran yang akan dicapai
 - Indikator Kinerja
 - Formulasi Perhitungan/penjelasan dan
 - Sumber data
- c) Agar membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Agar memublikasikan laporan kinerja di website Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Agar Menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c) Agar laporan kinerja memuat analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- d) Agar Laporan Kinerja memuat kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya dan/atau hambatannya.



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



e) Agar Laporan Kinerja memuat efisiensi atas penggunaan sumber daya (Orang, anggaran, mekanisme/SOP) dalam mencapai kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar melakukan pemantauan Capaian Kinerja Inter dengan membuat Laporan Monev yang menyajikan informasi seluruh kriteria sebagai berikut

- Target Kinerja
- Realisasi Kinerja
- Faktor Pendorong
- Faktor Hambatan
- Rekomendasi (saran perbaikan)

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN						
No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Pemantauan Kinerja					
	a. Agar memiliki dan dokumen pemantauan kinerja di website Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mempublikasikan ke Website BPBD BPPD	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan
	b. Agar memiliki dokumen kebijakan (indikator Kinerja) Tujuan yang mendukung kinerja SMART dan cukup pada Rencana Strategis (Dasar)	Mengusulkan untuk kebijakan (indikator Kinerja) Tujuan yang mendukung kinerja SMART dan cukup pada Rencana Strategis (Dasar)	2021-2026	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan
	c. Agar memiliki dan upaya pencapaian kinerja agar tercapai setelah 50%	Rapat Evaluasi Kinerja Berjangka dan Berkelanjutan secara Berkala	Permanen	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan
	d. Agar melakukan perbaikan pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan dari hasil analisis perbaikan kinerja selanjutnya	Rapat Evaluasi Berkelanjutan untuk Evaluasi Pemantauan Kinerja yang dilakukan dari hasil analisis perbaikan kinerja selanjutnya	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan
perbaikan kinerja selanjutnya dan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dengan membuat laporan/monev terhadap hasil Monitoring Rencanama Aksi						
II	Pengukuran Kinerja					
	a. Agar membuat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja	Membuat Pedoman Teknis Pengukuran Untuk Pengumpulan Data Kinerja Rencana SIP	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan
	b. Agar melengkapi dokumen ISU dengan data operasional yang jelas dan serta mengkur indikator kinerja yang memadai yaitu harus membuat informasi sebagai berikut: Sasaran yang akan dicapai, Indikator Kinerja, Formula, pertanggungjawabannya, dan sumber data	Melengkapi Draft: Operasional untuk Dokumen ISU	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan
	c. Agar Membuat Laporan yang jelas terhadap pencapaian data kinerja yang dapat diartikan sebagai berikut: 1. Terapat pedoman atau SIP yang pengumpulan data kinerja yang dapat diartikan 2. ada kemandirian untuk melakukan sendiri data kinerja yang up to date 3. terapat penanggung jawab yang jelas	Rapat Evaluasi kinerja yang Dapat Diartikan	Permanen	Januari 2024 - Desember 2024	Sekolah Belang	Dalam proses pelaksanaan



1. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
2. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
3. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
4. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
5. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
6. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
7. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
8. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
9. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024
10. Analisis Kinerja	Analisis Kinerja	1 Tahun	Januari 2024	Desember 2024	Desember 2024

Agar Laporan Kinerja dapat efektifitas atas pencapaian sumber daya (Meningkatkan efektivitas/efisiensi) dalam mencapai kinerja	Rapat Evaluasi Rutin Bulat	Per Bulan	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
8. Agar melakukan pemeriksaan Capaian Kinerja Internal dengan membuat Laporan Monev yang menyajikan informasi sebagai berikut: 1. Target Kinerja 2. Realisasi Kinerja 3. Faktor Pendukung 4. Faktor Hambatan 5. Rekomendasi (Saran Perbaikan)	Rapat Evaluasi Target Kinerja Realisasi Kinerja Untuk Capaian Laporan Monev	Per Semester	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan

g Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

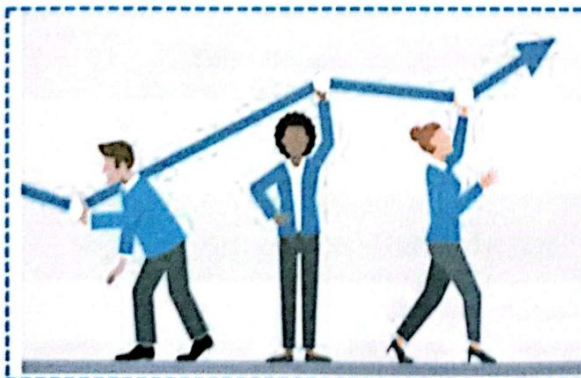
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.4.180.907.689 atau 92% dari total anggaran sebesar Rp. 3.846.745.413, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 8%.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri terdiri atas 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu

1. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama
2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya
3. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Nagari	15	7	46,66%
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	Nagari	2	6	300%
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	Nagari	5	3	60%
Rata-rata capaian (%)						135%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu

- ✓ Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
- ✓ Ganting Mudik Selatan
- ✓ Langkitan
- ✓ Nagari Durian Seribu
- ✓ Duku Utara
- ✓ Barung- Barung Belantai Tengah
- ✓ Pulau Karam

Nagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari

b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu

4. Nagari Duku
5. Nagari Duku Utara
6. Nagari Barung-Barung Belantai Tengah

Target tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..

- c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :

4. Nagari Ampang Pulau
5. Nagari Painan Selatan
6. Nagari Amping Parak

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	182	51	7
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	0	2	6
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	0	5	3

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2022

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja NKinerja Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	7	17	41,17	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	6	8	75	
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	3	8	37,5	

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Strategi Provinsi dan Nasional

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari Tangguh BPBD tahun 2024 dengan Provinsi dengan Nasional tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Badan penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

Target Indikator Kinerja nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri didukung dari dana Idrip BNPB dan Jamari Sakato.



- a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu
- ✓ Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
 - ✓ Ganting Mudik Selatan
 - ✓ Langkitan
 - ✓ Nagari Durian Seribu
 - ✓ Duku Utara
 - ✓ Barung- Barung Belantai Tengah
 - ✓ Pulau Karam
- Nagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari
- b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu
7. Nagari Duku
 8. Nagari Duku Utara
 9. Nagari Barung-Barung Belantai Tengah
- Target tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..
- c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :
7. Nagari Ampang Pulau
 8. Nagari Painan Selatan
 9. Nagari Amping Parak

Faktor Kegagalannya Karena Kurangnya Anggaran Pendukung indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15	7	46,66	4.180.907.907	3.846.745.413	92	
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2	6	300				
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	5	3	60				

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota , Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
2. Pelayanan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelatihan Pencegahan Dan mitigasi Bencana

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri adalah sebesar Rp. 277,171,590 atau 99,46% dari total anggaran sebesar Rp. 275.679.939, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,53%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Satuan	100	89	89
Rata-rata capaian (%)						89

Sumber : Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	41,00	89,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 48% dari 41,00 pada Tahun 2023 menjadi 89,00 pada Tahun 2024.

c. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89,00	100,00	89,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	100,00	89,00	89,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	89,00	89,00	1.737.362.405	1.682.691.597	96,85	

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini Pada Tahun 2023 Program Inovasi Penanggulangan Bencana Pada Kegiatan KATANA dengan Anggaran Rp. 20.000.000 dari Anggaran APBD mencapai Nilai 41. Pada Tahun 2024 Kegiatan dan Subkegiatan Penunjang Inovasi KATANA tidak ada Anggarannya dan pencapaian inovasi 89 ini didukung oleh Dana dari BNPB pada Kegiatan DESTANA (Desa Tangguh Bencana).

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada Tabel 3.21 berikut.



TABEL. URUSAN WAJIB ANGGARAN TAHUN 2024

No	URUSAN WAJIB DAN/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.918.275.394	5.529.437.010	93,42
I	(01)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.180.907.689	3.846.745.413	92,00
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.583.885	41.613.350	93,33
2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.249.275.394	2.998.980.456	92,29
3	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.960.000	174.524.688	84,73
3	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.356.260	2.340.889	99,34
4	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.452.021	4.423.000	99,34
5	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.270.767	30.188.100	99,72
6	06	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.740.235	26.026.000	97,32
7	07	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.925.000	1.815.000	94,28
8	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.726.000	236.887.394	95,24
9	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000	58.207.586	93,28



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



10	10	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	36.889.000	94,12
11	11	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.628.147	224.895.950	90,45
II	(02)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.737.367.705	1.682.691.597	96,85
12	01	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	98.071.150	97.330.389	99,24
13	01	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Keselapsiagaan Terhadap Bencana	56.674.745	56.388.500	100
14	01	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	122.425.695	121.981.050	99,63
15	01	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.191.553.301	1.174.288.280	98,55
16	02	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	94.290.110	79.732.950	84,56
17	03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	72.927.007	56.293.805	77,19
18	04	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	101.425.697	96.716.623	95,35

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Plafon anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 5.918.275.394,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.529.437.010,- atau sebesar 93,42%.
2. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.918.275.394 atau sebesar 93,43%.



2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA TRIMESTER I TRIWULAN I TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Indikator	Tahapan Kinerja	2023			2024			Program	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2024
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%						
1	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Alam yang Akibat Peristiwa Bencana	Nilai Akut Peristiwa Bencana	407,51	80 (19,12)	80,11%	407,51	80 (19,12)	80,11%	Program Penanggulangan Bencana Peristiwa Alam Akibat Peristiwa Bencana	4.095.124.419	695.951.694	1.957.419.956	2.894.948.574	3.846.745.411
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Melalui Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Negeri Tanggah Bencana	51	51	100%	15	7	46,67%	Program Penanggulangan Bencana	1.717.362.405	412.691.694	546.525.956	1.385.498.405	1.882.691.597
		Jumlah Negeri Tanggah Bencana	51	51	100%	2	0	0,00%						
		Jumlah Negeri Tanggah Bencana	51	51	100%	3	3	60,00%						
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Bencana	Nilai Komitmen Layanan (KPL)	100%	41%	41%	100%	99%	99,00%						
Total					85,31%			116,37%		6.810.486.823	1.112.643.388	2.503.945.912	4.280.439.979	5.729.437.008

Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Desember 2024
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

KABUPATEN PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 89,5%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu sasaran "Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana". Untuk nilai terendah adalah 72,5% yaitu sasaran "Pemulihan Daerah Terdampak Bencana".

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (Lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 300%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu indikator kinerja "Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana", sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 46,66% yaitu indikator kinerja "Persentase Terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana".

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.5.918.275.394,- terealisasi sebesar Rp.5.529.437.010,- atau 93,42%. Dari 20 (dua puluh) sub-kegiatan, capaian anggaran belanja tertinggi adalah sub-kegiatan "Penanganan Pasca Bencana" dan sub-kegiatan "Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana" yaitu 100% dan terendah adalah sub-kegiatan "Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" yaitu 11%. Pencapaian yang sangat



rendah ini disebabkan pada perubahan anggaran tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program sehingga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir.H.DONI GUSRIZAL, MM**

Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

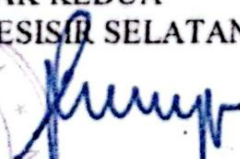
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Painan, 22 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (87,5)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana utama	5

B
100%
100%

Program/Kegiatan

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 4.093.124.458,-

2. Program Penanggulangan Bencana

Rp. 1.737.362.495,-

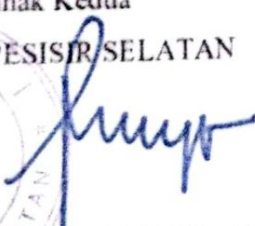
J U M L A H

Rp. 5.830.486.953,-

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua

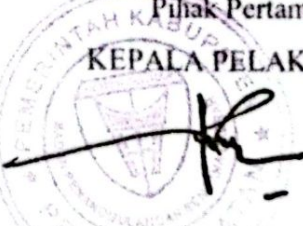
BUPATIPESISIRSELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Pihak Pertama

KEPALA PELAKSANA



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. H. Agus Salim Painan, E-mail : bpbdpessel84@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSKARDI, SST, MT

Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Painan, 10 Agustus 2024
PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA

YUSKARDI, SST, MT
NIP.19700123 199903 1 004

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (87.5)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana utama	5

Program/Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Anggaran

Rp. 4.180.907.689,-

Rp. 1.737.367.705,-

J U M L A H

Rp. 5.918.275.394,-

Pihak Kedua

BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Painan, 10 Agustus 2024

Pihak Pertama

KEPALA PELAKSANA

YUSKARDI, SST,MT
NIP.19700123 199903 1 004